

# KEBIJAKAN FORMULATIF DALAM PERUMUSAN SANKSI PIDANATERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA

Gita Ayu Puspitasari<sup>1</sup>, Prija Djatmika<sup>2</sup>, Lucky Endrawati<sup>3</sup>

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : gitaayupuspitasari@rocketmail.com

## **Abstract**

---

*In the case of children who commit the crime of repetition, the type of punishment which can be given to the child should aim to educate and for the welfare of the child. According to the type of crime should not be equated with child and adult offenders. Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 about Criminal Justice System For Children still having an ambiguity with the diversion.*

*By using the method of normative research, statute approaches, and conceptual approach, this journal describes the ideas or concepts related to the future formulation of norms on children's repetition of criminal acts by which the Community Service Order. The concept of Community Service Order obtained from comparing with the International Regulations, and several countries in the world. The result is of research is about Community Service Order's procedure include age, type of work, safety, working conditions and the environment, and payment system.*

**Key words:** *policy, recidive, children*

## **Abstract**

---

Dalam perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak harus bertujuan untuk mendidik dan demi kesejahteraan anak. Jenis pidana harus sesuai bagi anak dan tidak disamakan dengan pelaku dewasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana masih mengalami kekaburan hukum dengan adanya diversi.

Dengan menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan, maka tulisan ini menguraikan tentang ide atau konsep ke depan terkait perumusan norma tentang pengulangan tindak

---

<sup>1</sup> Penulis adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan tahun 2012.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

pidana oleh anak yaitu dengan mengotimalkan pidana kerja sosial. Konsep pidana kerja sosial didapat dari membandingkan dengan ketentuan internasional serta beberapa negara di dunia. Hasil penelitian yang didapat adalah tentang tata cara pidana kerja sosial meliputi usia, waktu kerja, jenis pekerjaan, jaminan keselamatan, kondisi dan lingkungan kerja, dan sistem upah.

**Kata kunci:** kebijakan, pengulangan tindak pidana, anak

### **Latar Belakang**

“Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi. UUD NRI 1945 dalam penerapan hukum di Indonesia mensyaratkan untuk tidak membedakan antara suku, agama, budaya masyarakat, dan lain-lain termasuk juga usia.”<sup>4</sup>

“Anak yang melakukan tindak pidana juga harus dikenai hukuman, namun hukuman yang diberikan berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa.”<sup>5</sup>

“Hal tersebut dikarenakan faktor usia dan faktor kematangan seorang anak berbeda dengan orang dewasa. Peradilan terhadap anak pun berbeda dengan orang dewasa dimana pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.”<sup>6</sup>

“Sistem peradilan dan penjatuhan hukuman terhadap anak terkadang tidak memiliki efek jera, sehingga anak seringkali mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, atau disebut dengan pengulangan tindak pidana.”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 102.

<sup>7</sup> Menurut Adami Chazawi, ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan

“Norma yang melindungi anak sebagai pelaku atau korban pada dasarnya telah lengkap yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

“Peraturan hukum yang terkait dengan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana mengalami kekaburan hukum dengan adanya diversi yang mengatur anak yang melakukan tindak pidana untuk pertama kali diajukan diversi sedangkan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana secara tidak tertulis dapat dijatuhi pidana maupun tindakan, padahal kasus pengulangan tindak pidana oleh anak seringkali terjadi di masyarakat, oleh karena hal tersebut perlu dilakukannya usaha-usaha dalam mengatasi kekaburan norma terkait jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.”<sup>8</sup>

“Usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan di atas dapat ditempuh dengan cara penemuan hukum dimana penemuan hukum mencakup hal-hal berikut, yaitu memperbaiki norma yang telah ada, mengoptimalkan norma yang ada, dan merombak norma-norma yang telah ditetapkan.”

“Pengulangan tindak pidana oleh anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak belum diatur dan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kekaburan hukum dengan adanya diversi sehingga hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk penjatuhan pidananya dikembalikan kepada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana sanksinya adalah pidana penjara yang lebih berat daripada

---

dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Undang-Undang.

<sup>8</sup> Kekosongan hukum atau kekosongan norma dapat dikarenakan 2 (dua) hal yaitu pertama pembuat Undang-Undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja, pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang kongkret diserahkan kepada hakim, kedua pembuat Undang-Undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah Undang-Undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan (leemten) dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku.

sebelumnya yaitu diperberat 1/3 (satu per tiga) dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan pengulangan tindak pidana lebih dari 1 (satu) kali dan anak dinilai telah mendapatkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang pernah dilakukan, jadi anak sebenarnya telah mendapatkan peringatan sebelumnya.”

“Pidana penjara yang diperberat yang dijatuhkan hakim kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sangat tidak tepat, karena anak yang dijatuhi pidana penjara akan mengalami kesulitan untuk masa depan dan cita-citanya. Stigma dan label”<sup>9</sup> yang diberikan kepada anak yang telah keluar dari penjara memberikan efek psikologis yang buruk.

“Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak memberikan efek jera sehingga anak tetap melakukan tindak pidana yang sama. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, yaitu pidana penjara yang lebih berat dinilai tidak sesuai apabila diberlakukan terhadap anak.”

“Jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana harus sesuai dengan anak dan tidak memberikan stigma negatif mengingat dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengadilan Anak mengemukakan bahwa anak merupakan generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.”<sup>10</sup>

“Pembangunan nasional yang baik harus melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Teori Labeling memandang orang yang melakukan tindak pidana tidak dinilai sebagai orang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya salah namun orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang sebelumnya memiliki status jahat yang diperoleh dari sistem peradilan pidana serta dari masyarakat luas. Tindak pidana yang telah dilakukan bukan merupakan faktor utama, namun reaksi masyarakat yang merupakan faktor utama. Tindak pidana atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikarenakan pandangan masyarakat yang diberikan kepadanya.

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan Anak.

<sup>11</sup> **Ibid.**

“Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, kemudian melakukan perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan anak dan bangsa di masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak tepat maka tujuan pembangunan nasional yang baik tidak dapat terwujud.”<sup>12</sup>

“Jenis pidana bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan juga terdapat kekaburan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim akan memberikan efek negatif kepada anak.”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang menjadi obyek pembahasan antara lain :

1. Bagaimana pengaturan tentang pengulangan tindak pidana oleh anak selama ini ?
2. Bagaimana konsep peraturan hukum terkait dengan pengulangan tindak pidana oleh anak ?

“Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau menelusuri suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>13</sup>

“Selain itu tulisan ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana pendekatan tersebut digunakan untuk memahami konsep-konsep kebijakan formatif dalam perumusan norma tentang pengulangan tindak

---

<sup>12</sup>**Ibid.**

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 93.

pidana oleh anak sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum dapat menjadi suatu pidana yang tepat bagi anak.”

“Jurnal ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan untuk membandingkan antara peraturan yang mengatur tindak pidana oleh anak di hukum pidana nasional, khususnya yang terkait dengan pengulangan tindak pidana oleh anak dengan konvensi-konvensi Internasional.”<sup>14</sup>

“Tulisan ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (*primary*), bahan hukum sekunder (*secondary*), dan bahan hukum tersier (*tertiary*).”

“Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer (*primary*), bahan hukum sekunder (*secondary*) maupun bahan hukum tersier (*tertiary*) dan atau bahan non hukum. Studi pustaka dapat disebut sebagai studi dokumen atau *literature study*”<sup>15</sup>.

“Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran bahan hukum melalui internet, sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam tulisan ini (*journal*) menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis method*).”

## **Pembahasan**

### **a. Pengaturan Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Di Indonesia**

“Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2014 mulai berlaku menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak, dapat diketahui dalam Undang-Undang tersebut juga ada kekaburan hukum tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi anak yang melakukan pengulangan pidana. Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal 261.

<sup>15</sup> Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum**, (Jakarta : Granit, 2004), hal 61.

<sup>16</sup> Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan saja berdasarkan pasal 69 ayat (2), sedangkan “pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada anak antara lain Pidana

“Perkara pemenuhan kewajiban adat<sup>17</sup>, anak harus melaksanakan perintah untuk membayar denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma-norma adat setempat dengan tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.”

“Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tidak hanya mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak, namun juga mengatur pidana peringatan dalam pasal 72.”<sup>18</sup>

“Putusan hakim bagi anak untuk dibina di luar lembaga terkait dengan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusan hakim tersebut sesuai pasal 74 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana terdapat keharusan-keharusan yang diikuti.”<sup>19</sup>

---

peringatan, Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, Pidana penjara. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh anak dari tindak pidana yang telah dilakukan dan pemenuhan kewajiban adat. Pidana tambahan berarti hanya dapat ditetapkan di samping pidana pokok atau utama, apabila hakim tidak menetapkan pidana pokok maka pidana tambahan dengan sendirinya tidak dapat ditetapkan, namun ada pengecualian misalnya pasal 39 ayat (3) KUHP dimana ditetapkan bahwa perampasan barang dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah sepanjang mengenai barang-barang sita. Hukuman pidana tambahan mempunyai sifat fakultatif apabila terbukti bahwa terdakwa bersalah maka hakim harus menentukan suatu pidana pokok. Hakim tidak wajib menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam buku Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan oleh Niniek Suparni pada tahun 2007 halaman 25-26. Pasal 71 ayat (3) mengemukakan bahwa apabila dalam hukum materiil seorang anak yang diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Hakim dalam menjatuhkan putusan atau menjatuhkan pidana kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

<sup>17</sup> Pemenuhan kewajiban adat menurut Made Sadhi Astuti dalam bukunya Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pada tahun 1997 halaman 136 menyebutkan bahwa tindakan koreksi berupa penutup malu, permintaan maaf dapat diterapkan untuk anak. Permintaan maaf mencerminkan asas kekeluargaan karena permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Petindak dan keluarganya datang kepada pihak korban dan keluarga korban untuk menyatakan permintaan maaf dan rasa penyesalan serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

<sup>18</sup> pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana syarat kepada anak dimana pidana penjara yang dijatuhkan paling lama selama 2 (dua) tahun. Ketentuan syarat umum dan syarat khusus bagi anak tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, program terapi di Rumah Sakit Jiwa, Program terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan penjelasan pasal 75 ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan

“Pidana pelayanan masyarakat yang dapat dijatuhkan kepada anak merupakan pidana yang berfungsi untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian anak terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang positif dengan ketentuan pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat selama 7 (tujuh) jam dan paling lama selama 120 (seratus dua puluh) jam.”<sup>20</sup>

“Pidana pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijatuhkan kepada anak selama 3 (tiga) bulan hingga 2 (dua) tahun dimana anak diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”<sup>21</sup>

“Pidana pelatihan kerja bagi anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dimana pelaksanaannya berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan selama 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun.”<sup>22</sup>

“Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir dimana anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dinilai

---

Pidana Anak, pejabat pembina adalah petugas yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan. Ketentuan mengenai anak yang melanggar syarat khusus selama masa pembinaan, yaitu anak melakukan pelanggaran untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

<sup>20</sup> Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial dimana bentuk pelayanan masyarakat dapat dicontohkan membantu orang lanjut usia, orang cacat atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor-kantor kelurahan.

<sup>21</sup> Pasal 77 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan pasal 78 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yaitu balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.



membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”<sup>23</sup>

“Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengatur tentang pidana yang dijatuhkan terhadap anak, namun juga mengatur mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang diatur dalam pasal 82 ayat (1).”<sup>24</sup>

#### **b. Perumusan Konsep Peraturan Hukum Terkait Dengan Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak**

“Perumusan konsep peraturan hukum dapat ditempuh dengan cara melakukan penemuan hukum dimana penemuan hukum dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum.”<sup>25</sup>

“Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga penciptaan dan pembentukan hukum.”<sup>26</sup>

“Pidana penjara yang diperberat 1/3 (satu per tiga) bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana merupakan suatu pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi anak dan bukan bertujuan semata-mata

---

<sup>23</sup> Pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dilaksanakan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan mengenai anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

<sup>24</sup> Pengembalian kepada orang tua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM); dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya kecuali anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat ijin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Terkait dengan perbaikan tindak pidana, dapat dicontohkan misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

<sup>25</sup> E-book yang berjudul Metode Penemuan Hukum tertanggal 4 Desember 2013 oleh Suyogi Imam Fauzi, diakses pada 23 Mei 2014.

<sup>26</sup> **Ibid.**

demi kebaikan, kesejahteraan dan demi masa depan anak. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana selama ini masih bersifat membalas dan peradilan pidana anak masih berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial yang bertentangan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan bagi anak.”<sup>27</sup>

“Tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut dimana terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yaitu paradigma pembinaan individual (*individual teratment paradigm*), paradigma retributif (*retributive paradigm*), serta paradigma restoratif (*restorative paradigm*).”<sup>28</sup>

“Rule 17 The Beijing Rules secara garis besar telah mengemukakan bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak harus melalui pemikiran yang sangat hati-hati oleh hakim dan harus dijatuhkan seminimal mungkin, pidana penjara bagi anak tidak boleh dijatuhkan kecuali anak telah melakukan tindakan kekerasan atau tindak pidana yang serius.”

“Penjatuhan pidana penjara yang selama ini dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat dinilai tidak meminimalisir penggunaan pidana penjara, hakim dengan mudahnya

---

<sup>27</sup> Menurut Paul H. Hahn, pengadilan anak tidak boleh semata-mata berfungsi sebagai suatu peradilan pidana untuk anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial (*The Juvenile Court should not function merely as a criminal court for children, not should it function merely as a social agency*). Tujuan pemidanaan bagi anak semata-mata berdasar dari pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak, dimana dasarnya adalah Rule 5.1 The Beijing Rules yang berbunyi sebagai berikut : “*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence.*”

Commentary dari Rule 5.1 The Beijing Rules menyebutkan bahwa “adanya tujuan dan sasaran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pertama demi memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*).Memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus yang utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan-peradilan pidana. Sistem hukum tersebut harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip kesejahteraan anak berarti menunjang prinsip untuk menghindarkan anak dari sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*). Kedua yaitu prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).Sasaran kedua adalah prinsip yang merupakan alat-alat untuk mengekang penggunaan sanksi oleh hakim yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desert*).

<sup>28</sup> Gordon Bazemore dalam M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 45.

menjatuhkan pidana penjara bagi anak. Permasalahan tersebut dikarenakan belum ada norma atau peraturan hukum yang mengatur secara jelas tentang pengulangan tindak pidana oleh anak, baik di Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

“Berdasarkan hal tersebut, maka pidana penjara yang selama ini dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dinilai tidak tepat bagi anak karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi anak yaitu yang pada dasarnya semata-mata demi kesejahteraan anak.”

“Sebelum adanya penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, maka sebelumnya para hakim harus mengerti tentang kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum.”<sup>29</sup>

“Hakim selain mempertimbangkan kategori perilaku anak tersebut, juga harus memperhatikan faktor-faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya anak melakukan tindak pidana, khususnya anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi dan sosial, dan faktor psikologis anak.”<sup>30</sup>

“Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan pengulangan tindak pidana perlu mendapat perhatian yang khusus, hal tersebut disebabkan karena putusan hakim harus mengutamakan

---

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)**, *op. cit*, hal 33. *Status Offence* dapat diartikan sebagai perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang-orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut kepada orang tua, keluar rumah secara paksa dan tanpa izin, membolos sekolah dan lain sebagainya. *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hukum. *Juvenile Delinquency* dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kenakalan anak. *Juvenile* berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan-peraturan, dan lain-lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delikueni sebagai tingkah laku yang menyalahi aturan secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

<sup>30</sup> A. Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, **Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum** (Yogyakarta : Liberty, 1985), hal 31.

pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak di samping pemberian tindakan-tindakan yang bersifat menghukum.”<sup>31</sup>

“Upaya dalam hal menjatuhkan pidana yang terbaik bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terdapat beberapa cara yang harus dilakukan secara terpadu antara tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan-tindakan kuratif.”<sup>32</sup>

“Tindakan penghukuman bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pada dasarnya bergantung kepada hakim dimana hakim dalam menjatuhkan pidana harus benar-benar disesuaikan dengan perbuatannya, sehingga dapat dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri, hidup susila dan mandiri. Pengadaan pengadilan anak yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan anak, dan pengadaan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja yang disertai dengan fasilitas menunjang dan edukatif, sehingga anak dan remaja dapat hidup secara mandiri.”<sup>33</sup>

“Tindakan-tindakan kuratif merupakan salah satu tindakan yang sangat penting setelah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dijatuhi hukuman.”<sup>34</sup>

“Proses inilah yang dapat mengurangi jumlah pengulangan tindak pidana anak karena setelah dijatuhi pidana anak tidak dilepaskan begitu saja, namun anak dibina dan diberi bimbingan sehingga dapat berfikir lebih baik, memiliki efek psikologis yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat hidup mandiri.”<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Wagati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, *op. cit*, hal 45-47.

<sup>32</sup> M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)**, *op. cit*, hal 28.

<sup>33</sup> **Ibid**, hal 39.

<sup>34</sup> Tindakan kuratif merupakan tindakan yang bergerak di bidang usaha penyembuhan kenakalan anak dan memiliki bentuk-bentuk tindakan yang khas dan bersifat mendidik.

<sup>35</sup> Tindakan kuratif bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yaitu menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan-kejahatan, melakukan perubahan-perubahan lingkungan dengan jalan dicarikannya orang tua asuh dan pemberian fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak dan para remaja, pemindahan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke lingkungan-lingkungan sosial yang baik, pemberian latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin, memanfaatkan waktu-waktu senggang di tempat-tempat pelatihan untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan beberapa rekreasi

“Tindakan-tindakan kuratif wajib dijatuhkan bersamaan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan hakim kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana baik anak melakukan tindak pidana atau anak melakukan pelanggaran-pelanggaran, hal tersebut dikarenakan pentingnya tindakan kuratif dalam menyembuhkan dan dapat berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga anak dapat bersosialisasi dalam masyarakat dengan baik serta dapat hidup mandiri. Tindakan kuratif tersebut dapat menjadi modal dan bekal anak ketika anak sudah menjadi dewasa.”

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah mengoptimalkan pidana kerja sosial mengingat pidana penjara tidak memberikan efek jera terhadap terpidana serta mengingat efek-efek negatif pidana penjara apabila dijatuhkan kepada anak dengan mudah. Pidana penjara dapat menghancurkan masa depan anak (stigma dan labeling) serta kehidupan dalam penjara tidak baik untuk anak karena lingkungan dalam penjara dapat menjadikan anak belajar lebih banyak tentang kejahatan.”<sup>36</sup>

“Penulis mengajukan konsep ke depan agar Undang-Undang yang terkait dengan pidana kerja sosial bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ditambahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pidana pokok. RUU KUHP Indonesia pun harus memasukkan

---

yang sehat dengan tingkat disiplin yang tinggi, menggiatkan organisasi-organisasi kepemudaan dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak dan remaja yang melakukan pengulangan tindak pidana bagi pasaran kerja dan hidup di tengah-tengah masyarakat, pendirian klinik-klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional serta gangguan kejiwaan yang lain.

<sup>36</sup> Menurut *Dictionary of Law Oxford University*, pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pengganti pidana lainnya, misalnya pidana penjara (*imprisonment*) dimana dalam hal anak dijatuhi pidana kerja sosial ini terpidana harus sudah dewasa dan mensyaratkan juga adanya persetujuan dari terpidana (*who must consent and be agen' at least 16*). Bentuk-bentuk pidana kerja sosial ialah berupa menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa bayaran dengan jangka waktu tertentu yaitu 40 (empat puluh) sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) jam. Pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial yang harusnya dijalani oleh terpidana akan memberikan konsekuensi dijatuhkannya denda atau dibatalkannya pidana kerja sosial dan dijatuhkannya hukuman yang seharusnya dijalani oleh terpidana.

ketentuan mengenai pidana kerja sosial bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana secara jelas di dalam pasalnya.”

“Pidana kerja sosial ditambahkan ke dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan pengaturan pidana bagi anak harus dibedakan dengan pengaturan pidana bagi orang dewasa, perlu pengaturan tersendiri dan spesifik bagi anak mengingat anak pidana yang dijatuhkan kepada anak semata-mata bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik dan demi kesejahteraan anak.”

“Pidana kerja sosial sangat menjunjung tinggi prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak, dimana prinsip tersebut diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak. Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak tersebut meminta Negara dan pemerintah serta badan-badan publik dan privat untuk memastikan dampak terhadap anak-anak atas tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best of the child* atau prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).”<sup>37</sup>

Konsep yang harus diperhatikan setelah menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak baik ketentuan Internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka Penulis memberikan konsep dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Usia Anak Dapat Dijatuhi Pidana Kerja Sosial.

“Penulis mengajukan konsep ke depan agar usia anak yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.”

---

<sup>37</sup> Muhammad Joni, **Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga (online)**, <http://www.badilag.net>, (diakses 29 April 2014).

“Usia yang ditetapkan tersebut mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan fisik dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.”<sup>38</sup>

“Ketentuan mengenai usia anak dapat dijatuhi pidana kerja sosial juga mempertimbangkan ketentuan dari beberapa Negara. *Children And Young Persons Act* Singapura mengatur anak berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam *Rule 13 Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56 New South Wales* mengemukakan bahwa usia yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah di bawah 16 (enam belas) tahun dapat dijatuhi pidana kerja sosial selama 100 jam dan di atas 16 (enam belas) tahun selama 100 jam hingga 250 jam. *Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56 New South Wales*, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.”

## 2. Waktu kerja.

“Sehubungan dengan waktu kerja, anak dapat dijatuhi pidana kerja sosial selama 7 (tujuh) jam hingga 120 (seratus dua puluh) jam. Anak yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi pidana kerja sosial dengan jangka waktu minimal, sedangkan anak yang melakukan tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana kerja sosial dalam jangka waktu di atas 7 (tujuh) jam.”

“Dasar pertimbangannya adalah ketentuan di beberapa Negara, antara lain Singapura dan New South Wales. Jangka waktu pidana kerja sosial di New South Wales adalah 100 jam hingga 250 jam berdasarkan pertimbangan usia, sedangkan di Singapura maksimum adalah 240 jam.”

## 3. Jenis pekerjaan.

“Jenis pekerjaan yang diberikan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam pidana kerja sosial dapat berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan anak dapat melakukan pekerjaan

---

<sup>38</sup> Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan untuk mengganti kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh anak, namun tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan untuk kesejahteraan anak, jadi pekerjaan atau pidana kerja sosial yang diberikan kepada anak tersebut harus sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak maupun sesuai dengan minat yang dipilih oleh anak tersebut.”<sup>39</sup>

#### 4. Jaminan keselamatan.

“Pidana kerja sosial yang diberikan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana harus tetap menjamin adanya jaminan keselamatan selama pidana kerja sosial dilaksanakan oleh anak. Perlindungan dan jaminan keselamatan dan kesehatan yang diberikan kepada anak yang sedang melaksanakan pidana kerja sosial tersebut harus berasal dari pihak atau lembaga yang menampung anak melaksanakan pidana kerja sosial dan juga dari pihak Pemerintah pun harus memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan dan kesehatan.”<sup>40</sup>

#### 5. Kondisi dan Lingkungan Kerja.

“Hal yang tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah mengenai kondisi dan lingkungan kerja sebagaimana pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengemukakan bahwa anak tidak boleh dipekerjakan maupun dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.”<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

<sup>40</sup> Pasal 72 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengemukakan bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa.

<sup>41</sup> Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.



## 6. Sistem Upah.

“Pelaksanaan pidana kerja sosial bagi anak, anak tetap mendapatkan upah yang seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan, namun pidana kerja sosial bagi anak tersebut bukan untuk dikomersialkan, tetapi upah tersebut digunakan sebagai pengganti atas kesalahan yang diperbuatnya, untuk ganti rugi, dan sebagainya.”<sup>42</sup>

“Pemberian pidana kerja sosial tidak lepas pula dari jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak. Meskipun pidana kerja sosial memiliki banyak segi positif dan mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, sedangkan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana lebih dari 3 (tiga) kali tidak dapat dijatuhi pidana kerja sosial karena anak tidak merasa jera atas tindak pidana yang telah dilakukannya.”<sup>43</sup>

“Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana berat tidak dapat dijatuhi pidana kerja sosial, sebab hal tersebut sebenarnya bukan lagi mencerminkan kesalahan-kesalahan wajar yang dilakukan oleh orang yang memiliki usia yang masih muda. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana berat harus diberi pengawasan yang ketat dan pemberian tindakan-tindakan kuratif secara efektif dan dalam jangka waktu hingga anak mengerti dan menyadari akan kesalahannya serta memiliki perilaku yang jauh lebih baik dari sebelumnya.”<sup>44</sup>

“Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika, tidak dapat dijatuhi pidana kerja sosial, sebab anak yang berkaitan dengan kasus tersebut memerlukan pengawasan

---

<sup>42</sup> Berdasarkan pasal 83 ayat (3) RUU KUHP.

<sup>43</sup> Berdasarkan analisa Penulis.

<sup>44</sup> **Ibid.**

dan rehabilitasi medis dan sosial serta tindakan-tindakan kuratif untuk mengembalikan kondisinya seperti semula.”<sup>45</sup>

## **Simpulan**

1. “Jenis pidana dan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive* anak) terdapat suatu kekaburan hukum dengan adanya diversi sedangkan putusan hakim selama ini yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah dikembalikan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diperberat 1/3 (satu per tiga) karena adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.”
2. “Konsep peraturan hukum terkait dengan pengulangan tindak pidana oleh anak yang diajukan oleh Penulis adalah pidana kerja sosial beserta tindakan-tindakan kuratif sebagai pidana pokok.”

---

<sup>45</sup>**Ibid.**

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, **Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum**, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Sadhi Astuti, 1997, **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**, Penerbit IKIP Malang, Malang.
- Masruchin Ruba'I, 2001, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Kerjasama Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, PT Alumni, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, **Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2007, **Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rianto Adi, 2004, **Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum**, Granit, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1968, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tongat, 2004, **Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia**, UMM Press, Malang.
- Topo Santoso, 2001, **Kriminologi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2010, **Hukum Pidana Anak** PT Refika Aditama, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Artikel Internet**

Muhammad Joni, **Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga (*online*)**, <http://www.badilag.net>, (diakses 29 April 2014).